

**PENGAWASAN OPERASIONAL PELABUHAN TANJUNG HARAPAN OLEH
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

Oleh : Nora Parina

Nora.parina28@gmail.com

Pembimbing : Ernawati

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR.Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Maritime transportation is the most effective alternative in the Meranti Islands Regency because this region is an archipelago. Therefore, the need for sea transportation has a negative impact with the occurrence of disorder and the inconvenience of passengers while in port and the occurrence of traffic accidents in the territorial waters. Considering the high potential for irregularities by shipping operators, supervision is needed for the operation of the Port of Tanjung Harapan which is a port located in the capital of the Meranti Islands Regency by the KSOP of the Meranti Islands Regency. The purpose of this research is to see how the operational supervision of the Tanjung Harapan port by the KSOP class IV of the Meranti Islands Regency, as well as what factors are obstacles to the operational supervision of the Tanjung Harapan port. This type of research used in this research is qualitative with a qualitative descriptive approach and the selection of informants using a purposive sampling technique with data triangulation techniques as data analysis techniques. The results of this study found that supervision carried out by KSOP class IV of the Meranti Islands Regency still experienced a lack of human resources namely officers who conducted field supervision, inadequate port facilities to accommodate the number of potential passengers, lack of public awareness of the importance of safety when sailing with ship conditions that exceeds the capacity of the ship and does not apply strict sanctions to shipping entrepreneurs who violate the established seaworthiness standard.

Keywords: Supervision, Operations, Transportation.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan merupakan tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.

Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk salah satu kawasan yang memiliki keistimewaan karena letaknya yang strategis. Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triagle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam – Tanjung Balai Karimun. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan roda transportasi dan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut.

Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan roda transportasi dan ekonomi wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan terminal penumpang pelabuhan merupakan suatu satu jenis prasarana transportasi yang dikategorikan sebagai transportasi yang memiliki

kompleksitas akan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelabuhan menjadi ikon yang dianggap mampu menggambarkan sebuah wilayah sehingga akan menjadi gambaran pertama kabupaten Kepulauan Meranti bagi orang yang baru saja berada di wilayah tersebut.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan operasional merupakan pengawasan yang dilakukan berfokus kepada satuan-satuan tahapan-tahapan kegiatan operasional dilakukan yang bertujuan untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada kosumen atau pengguna jasa organisasi itu dilakukan dalam waktu perencanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah pejabat pemerintah dipelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap terpenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan pelayaran. Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah lembaga pemerintah dipelabuhan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

Pentingnya pengawasan terhadap pelabuhan Tanjung Harapan dikarenakan Pelabuhan Tanjung Harapan yang merupakan pelabuhan peumpang yang termasuk pelabuhan transit yang berada di ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti yang mana banyak keberangkatan kapal dimulai dari kota-kota lainnya seperti

keberangkatan dari kota Pekanbaru, Tanjung Balai Karimun, Batam dan kota-kota lainnya yang otomatis kemudian hanya tersisa sedikit kursi penumpang untuk calon penumpang keberangkatan dari pelabuhan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan kenaikan harga tiket pesawat sehingga transportasi laut menjadi alternatif yang paling efektif bagi masyarakat. Sehingga tentu saja memicu kesenjangan apabila musim libur telah tiba ketika lebaran, pemilu, tahun baru, dan sebagainya yang menyebabkan kenaikan persentase jumlah penumpang kapal yang cukup signifikan dan menyebabkan penumpukan calon-calon penumpang dipelabuhan.

Keterbatasan jumlah kapal dengan kebutuhan masyarakat akan transportasi laut mengakibatkan banyak dari pengusaha kapal yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Harapan Kabupaten Kepulauan Meranti yang melanggar standar kelangkaan kapal yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti sehingga pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan sangat diperlukan.

Pengawasan terhadap Operasional pelabuhan Tanjung Harapan sudah dilakukan oleh pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan kenyamanan penumpang ketika berada dipelabuhan maupun tindakan pencegahan terhadap kecelakaan lalu lintas perairan ketika melakukan pelayaran. Namun pengawasan tersebut belum efektif hal ini dikarenakan masih ditemukannya penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha pelayaran kapal yang masih memaksakan pelayaran dengan kondisi kapal yang overkapasitas penumpang yang tentu saja hal ini berbahaya untuk keselamatan nakhoda/staf kapal dan penumpang kapal itu sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring dengan dengan rumusan masalah pada penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu, yakni ilmu pemerintahan, khususnya ilmu bidang pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai bahan masukan dan informasi bagi peneliti lain yang ingin membahas dan melakukan

penelitian lebih lanjut tentang permasalahan dan kajian yang sama dimasa yang akan datang.

b. **Praktis /aspek guna laksana**

Sebagai informasi bagi pembaca dan penulis lain tentang Pengawasan operasional pelabuhan serta menjadi bahan untuk Badan atau Lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelabuhan agar paham dan menemukan sesuatu yang baru sehingga pengawasan bisa terlaksana dengan optimal.

2.1 KONSEP TEORI

2.1.1 Pengawasan

Manullang (2015) menyatakan pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditentukan. Tujuan dari pengawasan mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Sedangkan menurut **Badrudin (2014)** *Controlling* atau pengawasan sering disebut disebut pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula.

Menurut **Handoko (2015)** pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan, menurutnya pengawasan diperlukan tahapan-tahapan dalam melakukan pengawasan agar pengawasan agar pengawasan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Tahap-tahap pengawasan tersebut yaitu:

1. Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan). Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk menilai hasil.

2. Pelaksanaan pengukuran kegtan. Pelaksanaan dapat menggunakan beberapa pertanyaan, yaitu:
 - a. Berapa kali (*how often*), pelaksanaan harusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, bulanan.
 - b. Dalam bentuk apa (*what from*) pengukuran akan dilakukan misalnya dengan laporan tertulis , inspeksi visual, melalau visual.
 - c. Siapa (*who*) yang akan terlibat, manjer atau staff departemen
3. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar, tahap ini dapat dikatakan sebagai tahap kritis dari pengawasan karena kegiatan ini berupa membandingkan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitasnya dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan.
4. Pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk, yaitu mengubah standar, memperbaiki pelaksanaan, atau keduanya dilakukan secara bersamaan.

Menurut **Noor (2015)** Pengawasan ialah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Dari defenisi ini jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan yang serius tanda pada alat untuk mencegahnya.

Robert J.Morker dalam **Handoko (2015)** pengawasan manajemen adalah

usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan.

Siagian dalam (Darnisa, Muhlis Madani, 2016) menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

2.1.2 Pelabuhan

Menurut **Triatmojo dalam (Mhd.Mulyawan, 2016)** Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk kesuatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau bahkan antar Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan memberikan pengertian pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan layaran dan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau

menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan **Sugiyono (2015)**. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian. Maka penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Pelabuhan No.02 Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti. adapun alasan pemilihan lokasi adalah karena Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang terdiri dari pulau-pulau dan terpisah dengan ibu kota Provinsi yaitu Pekanbaru, sehingga menyebabkan transportasi laut merupakan alternatif terbaik sebagai penunjang ekonomi dan kebutuhan masyarakat, sedangkan Pelabuhan Tanjung Harapan merupakan pelabuhan yang letaknya diibukota kabupaten yaitu Selatpanjang sehingga aktivitas di pelabuhan ini cukup padat.

3.3 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang akan memberikan berbagai informasi yang di perlukan selama proses penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti. Informan adalah orang pilihan yang dapat menerapkan dan memberikan informasi sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini di tentukan dengan metode purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini dapat di lihat adalah sebagai berikut :

1. Pelaksana tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti
2. Petugas lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhanan

3. Staf petugas wilayah kerja pelabuhan Tanjung Harapan
4. Petugas PT. Pelindo bidang penjagaan pintu kedatangan dan keberangkatan di Pelabuhan Tanjung Harapan
5. Nakhoda kapal Tenggiri Express
6. Masyarakat penumpang kapal dipelabuhan Tanjung Harapan

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data secara langsung oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian yaitu di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data ini dapat diperoleh dari laporan-laporan penelitian terdahulu, jurnal, buku-buku, internet, media massa, dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian yang menunjang kelengkapan data penelitian ini. Data lainnya yang berkaitan dengan penelitian pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti dan data lain yang berkaitan dengan penelitian seperti data :

1. Data jumlah kapal dan kapasitas muatan kapal yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Harapan
2. Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan.
3. SOP Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal penting yang berhubungan dengan penelitian. Observasi adalah pengamatan langsung kesuatu objek yang diteliti, dan dapat dilakukan lebih dahulu. Dalam hal ini tujuan observasi itu adalah untuk mengecek sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan. Pengumpulan data melalui pengamatan dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis yang berkaitan dengan aktivitas penelitian pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan secara mendalam yang dianggap mengerti tentang permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara lebih mendalam dengan informan untuk memperoleh informasi dan pemahaman terhadap masalah yang terkait dengan pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Dokumentasi/literatur

Dokumentasi/literatur dalam penelitian ini literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini, termasuk data-data dan photo-photo sebagai bukti penelitian ini dilakukan.

3.6 Analisis Data

Bongdan dalam **sugiono (2015)** menyatakan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Teknik triangulasi, berarti penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapat data dari sumber yang sama. Berikut ini tahapan analisis data model Miles dan Humberman yaitu:

a. Data reduction (reduksi data)

Tahap pertama yang mereduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila perlu. Dalam penelitian ini reduksi data dapat dibantu dengan menggunakan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Data display (penyajian data)

setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Dalam penelitian ini data yang sudah direduksi diuraikan secara singkat menyangkut hal-hal yang terdapat dalam data tersebut.

c. Conclusion drawing/verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan mendukung yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dari rumusan masalah dalam penelian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Ototritis Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti

4.1.1 Menetapkan Standar Pengawasan

Penetapan standar pelaksanaan mengandung arti sebagai “ patokan” untuk penilaian-penilaian hasil kegiatan. Standar juga diartikan sebagai pedoman yang telah ditetapkan, dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai atau membandingkan penyimpangan yang ada, dimana standar dikenal juga sebagai sebutan ketentuan yang harus diikuti. Setelah diadakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi pada pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan.

Standar pengawasan disini merupakan tolak ukur yang akan dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Standar yang menjadi potokan atau pedoman pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti adalah standar kelaiklautan kapal yang mana merupakan standar

pengawasan yang diberlakukan ketika pelayaran kapal akan dilaksanakan guna untuk mengecek keadaan, perbekalan kapal dan kondisi layak dan standar jumlah muatan kapal untuk melakukan pelayaran.

4.1.2 Tindakan Pengukuran Kegiatan

Tindakan pengukuran kegiatan sia-sia apabila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan tindakan pengukuran kegiatan secara tepat. Pengukuran kegiatan terhadap kegiatan perkerjaan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tindakan pengukuran kegiatan dalam hal pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan dilakukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan pengawasan dilakukan yang dalam hal pengawasan operasional pelabuhan ini dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti setiap harinya pada jam kerja yaitu pukul 08.00-16.00WIB yang dilakukan oleh petugas Kesyahbandaran yang ditugaskan diwilayah Kerja Pelabuhan Tanjung Harapan dibantu oleh petugas PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Selatpanjang selaku badan usaha operator dan pengelola pelabuhan Tanjung Harapan.

4.1.3. Perbandingan Pelaksanaan Kegiatan dengan Standar

Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menentukan penyimpangan jika ada yaitu membandingkan hasil pelaksanaan dengan standar pelaksanaan dengan pencapaian apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak dan menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Melalui tahapan ini kita dapat

mengambil analisis kesimpulan antara hasil dasar pengukuran, apakah hasil dari pelaksanaan kegiatan dan standar pencapaiannya menentukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Tahapan ini merupakan Tindakan pengukuran kegiatan dengan standar ini merupakan proses adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Secara keseluruhannya pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu peraturan menteri perhubungan No. PM 76 tahun 2018 tentang tata kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan dengan standar kelaiklautan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.1.4. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Perlu

Tindakan koreksi yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti guna untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan menjamin kenyamanan, keamanan, dan ketertiban penumpang ketika dipelabuhan dan diperairan. Pengambilan tindakan koreksi sangat diperlukan mengingat masih ditemukannya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha pelayaran sehingga tindakan pengawasan terhadap operasional pelabuhan Tanjung Harapan harus lebih ditingkatkan lagi dan perlu adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut sehingga keselamatan berlayar diutamakan.

4.2 Faktor-faktor Penghambat Pengawasan Operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti.

4.2.1 Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu bentuk tindakan perbaikan terhadap penyimpangan yang terjadi pada pengawasan operasional Pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti adalah dengan cara menambah jumlah petugas dilapangan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan dilapangan sehingga dapat berjalan dengan baik dalam mengambil data dan menilai ketaatan pelaku usaha perkapalan sehingga dapat berjalan dengan baik dalam mengambil data dengan menilai kelayakan dan kapasitas kapal sehingga mempermudah dalam melaksanakan tugas dilapangan.

Mengingat bahwa jumlah petugas ini merupakan salah satu faktor yang efektif dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dipelabuhan sehingga dalam tugasnya dilapangan dapat terdata semuanya, maka sangat diperlukan jumlah petugas yang seimbang dengan beban kerja yang akan dilakukan dilapangan. Dalam melakukan pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan di kabuapten Kepulauan meranti Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menunjuk 2 orang petugas lapangan saja yang bertugas untuk megawasi setiap kegiatan operasional di Pelabuhan Tanjung Harapan.

4.2.2 Sarana dan Prasarana Pelabuhan Kurang Memadai Untuk Menampung Jumlah Calon Penumpang.

Sarana dan prasarana pelabuhan yang memadai untuk menampung seluruh jumlah calon penumpang dipelabuhan salah satu faktor untuk menentukan pengawasan berhasil dilakukan, dimana ketika calon penumpang kapal nyaman dan disiplin ketika berada diterminal pelabuhan akan membuat calon penumpang kapal merasa betah untuk menunggu jadwal keberangkatan selanjutnya dan tidak memaksakan diri

untuk melakukan perjalan karena kondisi diterminal pelabuhan yang tidak kondusif lagi dikarenakan calon penumpang harus berdesak-desakan apalagi ketika musim libur tiba yang otomatis jumlah calon penumpang dipelabuhan meningkat drastis.

4.2.3 Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Keselamatan Pelayaran

Kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengandalkan transportasi maritim sebagai salah satu tranportasi yang paling efektif menyebabkan kebutuhan akan kapal penumpang meningkat sedangkan jumlah kapal penumpang yang beroperasi terbatas, sehingga terjadinya operkapasitas kapal yang beroperasi di pelabuhan-pelabuhan yang ada dikabupaten Kepulauan Meranti apalagi ketika musim libur tiba. Dengan demikian, pengawasan operasional pelabuhan sangat diperlukan dan petugas kesyahbandaran perlu melakukan tindakan lebih guna untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya keselamatan ketika melakukan perjalanan pelayaran diperairan laut.

4.2.4. Tidak Diberlakukannya Sanksi Yang Tegas Terhadap Pelanggaran

Sanksi pelanggaran terhadap standar kelaiklautan kapal yang sudah diterapkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu berupa sanksi administratif, surat teguran, bahkan pencabutan Surat Perizinan Belayar (SIB). Namun sanksi tersebut tidak diberikan kepada pengusaha-pengusaha perlayaran yang melakukan pelanggaran di pelabuhan Tanjung Harapan Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pelanggaran tersebut masih ditemukan dilapangan.

6. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengolahan data yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan penulis mengenai pengawasan operasional

pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengawasan operasional pelabuhan yang dilakukan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan dengan indikator pengawasan yaitu: Menetapkan standar pengawasan yaitu standar kelaiklautan kapal, tindakan pengukuran kegiatan dilakukan untuk menilai kinerja serta mengetahui letak kesalahan yang dilakukan dengan pemantauan terhadap keberangkatan dan kedatangan kapal di pelabuhan, perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar yang secara keseluruhannya pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No PM 76 Tahun 2018 dengan standar kelaiklautan kapal yang telah ditetapkan sebelumnya, serta pengambilan tindakan koreksi terhadap pelanggaran.
2. Faktor yang menjadi penghambat pengawasan operasional pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Operasional Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu kurangnya sarana prasarana untuk menampung jumlah calon penumpang di pelabuhan sehingga kurangnya kenyamanan, dan keamanan di terminal pelabuhan, kurangnya kesadaran masyarakat akan keselamatan pelayaran ketika memaksakan diri untuk melakukan perjalanan dengan muatan kapasitas kapal yang penuh, tidak adanya penerapan sanksi yang tegas terhadap pengusaha perkapalan yang melakukan pelanggaran terhadap standar kelaiklautan kapal yang telah ditetapkan sebelumnya yang mana hal ini merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pengawasan operasional

pelabuhan Tanjung Harapan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti.

6.2 Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Kabupaten Kepulauan Meranti agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap operasional Pelabuhan Tanjung Harapan agar ketertiban di pelabuhan, keamanan dan keselamatan di pelabuhan maupun pelayaran nantinya bisa terwujud.
- b. Sebaiknya instansi terkait lebih memperhatikan sarana dan prasarana pelabuhan dan memperluas terminal pelabuhan itu sendiri mengingat jumlah calon penumpang yang melebihi daya tampung terminal, melakukan pengawasan lebih dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya keselamatan belayar dengan tidak memaksakan diri melakukan perjalanan dengan kondisi kapal penuh, dan sudah seharusnya kantor kesyahbandaran dan operasional pelabuhan lebih tegas dalam memberikan peringatan maupun sanksi terhadap pengusaha perkapalan yang melakukan pelanggaran terhadap standar kelaiklautan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pengawasan operasional pelabuhan bisa lebih maksimal dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosudirjo. (2015). *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta: Mediaterra
- Bahrudin. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen*. Dung: Alfabeta.
- Effendi, Usman. (2015). *Asas Manajemen*. Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Handoko, T. Hani. (2015). *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPEE
- Hasibuan, Malayu, SP. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Herlamabang, Susatyo. (2013). *Pengantar Manajemen (Cara Mudah Memahami Manajemen)*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Mannulang, M. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.-----
- (2018). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Noor, Juliansyah. (2015). *Penelitian Ilmu Manajemen*. Jakarta: Prenadamenia Grup.
- Relawati, Rahayu. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Pendekatan Aplikasi Bidang Pertanian*. Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sugiono.Agustinus. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnawati, Ernie Sule. Dkk. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Pramedia Grup.
- Jurnal:**
- Belly Aprialdi. (2012). Pengawasan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Pekanbaru Terhadap Pengujian Kelaikan Mobil Barang Tahun 2011-2012. *Jom Fisip*, 1-5
- Budi Prasetiawati, (2015). Pengaruh Perencanaan Dan Pengawasan Terhadap Kinerja pegawai Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten Tanah Bumbu. *Jom Fisip*, 11(1)
- Darnisa, Muhlis Madani, A. M. (2016). Fungsi Pengawasan Dalam Pengelolaan Perkir Dikota Makassar. *Jom Fisip*. 2
- Eric Try Putra Benawan, David P.E Saerang. W.P. (2018). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas Dan Transformasi Keuangan Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan.) . *Jurnal Fisip*. 13(3), 72-79.
- Hartati. T. (2013). Pengaruh Pengawasan Kepala Bidang Fasilitas Perhubungan Terhadap Target Retribusi Parkir Umum Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Majalengka. *Jom Fisip*, 3(1), 1-7.
- Mhd. Mulyawan. (2016). Koordinasi Penertiban Pelabuhan Ilegal Dikota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jom Fisip*, 3(1). 1-8.
- Sabrina. F. (2013). Pengawasan Kanotr Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Dumai Dalam Rangka Pelayanan Ekspor Tahun 2011-2013. *Jom Fisip*. 2(1), 1-11.
- Sari, Julia Purnama. (2014). Pengawasan Syahbandara Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Ketertiban, Dan Kemanan Penumpang, Di Pelabuhan Tembilahan. *Jom Fisip*. 1(2).
- Siregar, F. Y. (2015). Pengawasan Angkutan Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai. *Jom Fisip*. 2, 1-10.

Undang-undang:

Undang-Undang No.17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran

Perturan Bandar 1925 Pasal 4 Ayat 1,
Pasal 5 Ayat 1,2 Dan 3

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010
Tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 76 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 36
Tahun 2012 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas
Pelabuhan.